Bab 3

TANTANGAN, RESPON DAN ACUAN

A. TANTANGAN INTERNAL

1. Wanita dalam Jabatan Gerejawi

A.J. Anggui menamakan kedudukan wanita dalam jabatan gerejawi merupakan suatu hak gerejawi yang dicicil dalam perjalanan kehidupan Gereja Toraja. Mengapa dicicil? Karena butuh pergumulan dalam kurun waktu yang panjang untuk memungkinkan wanita menduduki jabatan gerejawi sama seperti laki-laki. Dalam kurun waktu tersebut perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit ruang untuk perempuan menduduki jabatan gerejawi terbuka perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit.

Sidang Sinode Am (SSA) V Gereja Toraja yang diselenggarakan di Rantepao, Maret 1955 dsngst gencar membicarakan hak untuk memilih pejabat gerejawi. Sampai dengan persidangan itu, hak untuk dipilih dan memilih hanya dimiliki anggota jemaat laki-laki. Perempuan belum diberikan hak, sesuai keputusan SSA I Gereja Toraja 1947. Namun pada SSA V itu, melalui pengambilan keputusan dengan suara terbanyak mutlak, akhirnya perempuan memperoleh hak sepenuhnya untuk memilih para pejabat gerejawi (penatua, pendeta dan syamas), tetapi belum diberikan hak untuk dipilih. Perubahan ini dipengaruhi oleh pikiran tokoh-tokoh gereja yang sudah lebih maju pada saat itu, seperti Pdt. J. Sumbung, Pdt. J. Linting, dan Guru Injil M. Lebang.

Sekalipun hak dipilih bagi wanita belum disepakati, SSA XV di Tagari tahun 1978 membuat langkah maju dengan memberi kesempatan kepada wanita mengambil bagian secara terbatas dalam kebaktian gerejawi. Pada

T
T
"T
IT
Fi
Ti
nr
'ir
m

SSA XV itu diputuskan, “menyetujui bahwa wanita baik yang dapat pendidikan teologi, maupun yang tidak melalui pendidikan teologi, yang mempunyai karunia dan bersedia, diperkenankan melayani kebaktian-kebaktian di tengah-tengah jemaat setelah disetujui majelis gereja”.

Bersamaan dengan itu juga, SSA XV tersebut telah mendudukan wanita dalam kepengurusan KUGT (Komisi Usaha Gereja Toraja - sekarang Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja (BPS-GT)) yakni Ny. A. Lebang dan Ny. G.S. Kobong.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada SSA XVII di Palopo. Dalam SSA yang diselenggarakan di Palopo tahun 1984 tersebut diputuskan:

- 1) Menerima wanita dalam jabatan gerejawi untuk semua jabatan (pendeta, penatua dan syamas)
- 2) Pemberlakuan keputusan ini diserahkan kepada majelis gereja di tiap-tiap jemaat.

Keputusan ini langsung terealisasi di berbagai jemaat pada tahun itu juga.

Untuk jabatan Pendeta, Ny. D.M Anggui, S.Th.-lah yang pertama-tama ditahbiskan, yakni pada 31 Maret 1986, disusul pendeta Ribka Sinda, B.Th. pada Mei 1986, lalu pdt Dina Toding, B.Th pada Maret 1988.

Polemik disekitar wanita dalam jabatan gerejawi terjadi baik karena alasan teologis maupun praktis. Alasan teologisnya didasarkan pada penafsiran atas 1 Korintus 14:34-35, sementara alasan praktis berhubungan dengan keadaan dan kemampuan fisik yang banyak kali menjadi halangan bagi perempuan untuk bekerja secara optimal.

2. Oikumene

Secara kelembagaan, Gereja Toraja menempatkan diri sebagai bahagian dari pergerakan oikumenis; baik sedunia, regional, nasional, wilayah maupun di setempat-setempat. Gereja Toraja tercatat sebagai anggota pada: Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah Sulselra (sekarang menjadi SULSELBARA), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Christian Conference of Asia (CCA) dan World Council of Churches (WCC). Di samping itu, Gereja Toraja menjadi anggota dari 2 (dua) organisasi dunia dari gereja-gereja berlatarbelakang Calvinis, yakni World Alliance of Reformed Churches (WARC) dan Reformed Ecumenical Churches (REC).

Kepada setiap Badan tersebut Gereja Toraja membayar iuran anggota setiap tahun sebagai wujud tanggungjawab dan dukungan Gereja Toraja bagi kegiatan-kegiatan oikoumenis. Selain itu, Gereja Toraja telah mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, baik berupa konsultasi maupun seminar atau pelatihan. Kesempatan-kesempatan tersebut telah merupakan sarana pengembangan SDM Gereja Toraja.

Beberapa kali, sebagai bahagian dari pergerakan oikumenis, Gereja Toraja menjadi tuan/nyonya rumah persidangan oikumenis tersebut. Belakangan ini, yang tercatat, Gereja Toraja menjadi penyelenggara Sidang MPL PGI pada tanggal 8-13 Oktober 2002 yang diselenggarakan di Hotel Misiliana; REC menyelenggarakan Rapat Executive Committee di Hotel Toraja Prince pada tahun 2004; Pertemuan Jaringan Kerja Wanita Gereja Nasional yang merupakan program Biro Wanita PGI, diselenggarakan di PSP Tangmentoe pada tanggal 1-6 Februari 2004; penyelenggara konsultasi

tentang Peran Pendampingan (Pastoral) Gereja terhadap Migrant Workers diadakan di PSP Tangmentoe pada tanggal 1-4 Juli 2004. Kegiatan yang terakhir ini merupakan program kejasama Gereja Toraja dengan Christian Conference of Asia (CCA). PGI Wilayah Sulselra serta Gereja-gereja tetangga dari Sulawesi Selatan dan Tengah diundang hadir. Bahkan hadir pula wakil-wakil dari Gereja Basel di Kota Kinabalu dan Tawau, Malaysia, khususnya dari jemaat yang mayoritas warganya berasal dari Toraja. Sebagai narasumber hadir pula seorang staf eksekutif CCA, staf dari Center for Migrant Workers di Jakarta (program pelayanan masyarakat kota dan industri dari HKBP), dua orang staf dari Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Tana Toraja, serta seorang ex TKI yang pernah bekerja di Taiwan. Konsultasi Migrant Workers yang pesertanya datang dari beberapa tempat di Indonesia. Gereja Toraja juga menyelenggarakan Seminar *Calvyn Society* yang dirangkaikan dengan emeritasi Pdt. DR. Th. Van den End.

Pada aras jemaat, dalam kehidupan praktis sehari-hari gema kehidupan oikumenis dalam perjumpaan dengan warga gereja lain tidak terlalu menonjol. Hal ini mungkin disebabkan iklim hubungan kekerabatan di Toraja, khususnya cukup baik. Sejauh ini, tidak pernah ada polemik dalam hubungan antar komitas masyarakat di Toraja. Lagipula, Toraja adalah sebuah entitas mayoritas Kristen. Salah satu tonggak untuk menilai hubungan oikumenis antar umat beragama di Toraja adalah fenomena meko-sebuah fenomena yang mampu menyedot kehadiran umat beragama dari berbagai denominasi; di mana mereka lebur menjadi satu dalam peribadahan yang dinamis.

Di tengah jalinan pergaulan oikumenis yang baik itu, salah satu faktor yang menunjukkan tanggapan lain terhadap kesiapan warga Gereja Toraja untuk beroikumene adalah kekisruhan di STAKN Toraja pada sekitar Agustus - November 2008. Menyikapi masalah tersebut, segelintir kecil para petinggi Gereja Toraja, dalam hal ini beberapa orang pucuk pimpinan Gereja Toraja, mengedarkan surat resmi kepada jemaat-jemaat, yang menghimbau warga gereja Toraja untuk tidak bersekolah di STAKN Toraja. Alasannya, lulusan STAKN Toraja sejak angkatan 2009 tidak akan diterima oleh BPS. Polemik tersebut mencederai semangat oikumenis, karena dari berbagai sumber lisan ditengarai bahwa alasan penolakan itu adalah pada teologi yang diajarkan di STAKN Toraja. Mereka menyebutnya sebagai “*teologi gado-gado*” mengingat para dosen STAKN berasal dari latar belakang perguruan dan paham teologis yang berbeda-beda. Syukurlah, bahwa warga Gereja Toraja sendiri cukup arif mengambil sikap, sehingga surat himbauan tersebut ‘diboikot’ di banyak jemaat. Hal ini menunjukkan kematangan dan kemandirian sikap jemaat dan warga Gereja Toraja yang dapat menyatakan sikap berbeda secara elegan dengan pucuk pimpinannya.

B. TANTANGAN EKSTERNAL

1. Hubungan dengan Pemerintah

Sejak terbentuknya jemaat-jemaat, hubungan dengan pemerintah dapat dikatakan berlangsung tanpa gejolak, bukan terutama karena menyadari hubungan tanggung jawab yang seharusnya melainkan terutama sebagai bagian dari masyarakat terjajah. Anggota masyarakat, termasuk orang Kristen, tidak bisa bertindak lain kecuali tunduk kepada kemauan. Ketika

pada bulan Maret, 1942 Jepang menduduki Luwu dan Tana Toraja dan berlangsung sampai saat Jepang menyerah pada tahun 1945 keadaan jemaat-jemaat (orang Kristen) sangat tertekan. Orang Kristen, karena kedekatannya dengan orang Belanda (Zending) dicurigai sebagai mata-mata Belanda. Harta milik gereja dirampas untuk kepentingan perang Jepang¹. Diberlakukan juga pemutusan secara total (*moratorium*) bantuan dana dari GZB. Semua utusan GZB dipenjarakan. Namun demikian situasi itu membuat jemaat-jemaat belajar mandiri, baik dalam hal dana maupun daya.

Dalam hal daya, mereka yang sudah diberi tanggung jawab pelayanan pada masa sebelumnya sekarang mengambil alih kepemimpinan. Sebelum para utusan Zending ditahan, mereka sempat mengurapi beberapa guru Injil menjadi pendeta. Mereka adalah S.T Lande', P.S Palisungan, J.Tappi', J. Sumbung, dan Z Tawalujan. Z. Tawalujan adalah seorang guru di Resort Rongkong, orang Manado yang datang dari daerah Poso).²

Hiruk-pikuk dan deru pergumulan berbagai pihak dalam berbagai persoalan sosial-politik seakan terhenti dan terdiam segera setelah masa yang disebut oleh pemerintah Orde Baru sebagai Orde Lama (Zaman Soekarno) terlewati. Soeharto yang mengambil alih kekuasaan berhasil menenteramkan semua hiruk-pikuk yang ada. Masa Orde Baru mulai berlangsung. Dengan segera pula terlihat bahwa Soeharto mampu mengendalikan/menjalankan pemerintahan. Bidang sosial-politik, ekonomi ditangani dengan cepat. Semua partai yang ada difusikan ke dalam hanya dua partai yaitu PDI dan PPP, dan satu Golongan Karya yang sangat berkuasa. Gerak gerik kedua partai itu

¹ Yang disebut harta milik gereja sebenarnya adalah harta milik zending, jadi dianggap milik orang Belanda dan bisa disita oleh pemerintah baru, yaitu Jepang. . . , Th. Van den End, *Op. Cit.* hlm. 508 pada catatan kaki. Bad. Th. Van den End, Ragi Canta II, Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an-sekarang, hlm. 167. ...

dikendalikan dengan baik sehingga gejolak-gejolak yang sering timbul pada masa Orde Lama tidak muncul. Perbaikan ekonomi pun segera dipacu. Terkenallah tentang Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahunan). Keberhasilan itu telah mengantar bangsa Indonesia berswa-sembada beras. Dan Soeharto menjadi bapak pembangunan.

Bagaimanakah Gereja Toraja selama masa Orde Baru itu? Dengan singkat dapat dikatakan bahwa pada masa yang aman dan tenteram itu Gereja Toraja bersama dengan semua anak bangsa dan dengan semua golongan ikut melangkah dalam masa pembangunan itu. Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi telah berhasil mendongkrak perbaikan ekonomi jemaat-jemaat Gereja Toraja, sehingga jemaat-jemaat dapat pula membangun dan memperbaiki nasib anggota jemaat. Anak-anak anggota jemaat dapat mengikuti pendidikan sampai ke perguruan tinggi tanpa terhambat oleh masalah biaya. Anggota jemaat, karena keamanan terjamin, dapat dengan leluasa pergi mencari pekerjaan ke berbagai wilayah di Indonesia

Jelas bahwa dalam hal-hal seperti tersebut di atas Gereja Toraja telah menikmati hasil-hasil pembangunan pada masa Orde Lama itu. Itu juga berarti hubungan dengan pemerintah berjalan baik. Berkat keberhasilan dalam pembangunan Gereja Toraja bisa mandiri dalam dana, suatu masalah yang selalu dikeluhkan oleh pengurus gereja.

Hal-hal Jjaik yang yang telah dinikmati dalam hubungan dengan pemerintah adalah suatu realitas, tetapi bukan pula tidak ada masalah dengan pemerintah. Pada akhir tahun 1970-an Gereja-gereja di Indonesia dalam hal Undang-Undang nomor 70 dan 77 tahun 1978, khususnya dalam

masalah bantuan dana dan tenaga. Gereja Toraja pun mengalaminya. Pada awal tahun 1980-an gereja digoyang lagi dengan masalah Pancasila yang dijadikan sebagai asas bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Gereja Toraja, setelah lama bergumul, bersama dengan gereja-gereja lainnya yang terhimpun dalam PGI, akhirnya menerima asas tunggal itu. Dijelaskan dalam “Tata Gereja Toraja” Bab I, pasal 4 bahwa “Dalam terang PENGAKUAN seperti pada pasal 3 di atas³, Gereja Toraja berasaskan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada masa Orde Baru itulah pula Gereja Toraja berhasil mengatasi masalah-masalah internal, baik yang menyangkut ajaran gereja maupun yang mengenai hal-hal praktis. Pada tahun 1981, dalam persidangan Sinode ke-16, Gereja Toraja menerima dan mengesahkan suatu Pengakuan Iman, hasil pergumulannya sendiri dalam konteksnya sebagai ganti Pengakuan Iman Belanda yang cukup lama diimani dalam Gereja Toraja. Pada waktu yang bersamaan itu pula disahkan sebuah tata gereja yang baru setelah sebelumnya dua kali direvisi (1960,1970). Pada tahun 1984, dalam Sidang Sinode Am GT ke-17, di Palopo, Kabupaten Luwu, dua hal penting diputuskan, yaitu Penerimaan Wanita dalam jabatan Gerejawati (pendeta) dan penerimaan suatu ajaran mengenai “Mati Utuh”. Penjelasan tentang “mati utuh itu terlampir dalam buku “Pengakuan Gereja Toraja”.

2. Pergolakan Sosial-Politik Era 1950 - 1967

³ Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juruselamat dunia serta Kepala Gereja, yang menebus dan menyelamatkan dari kebinasaan serta memberikan kehidupan yang kekal sesuai kesaksian Alkitab (Petjanjian Lama dan Petjanjian Baru) yang adalah Firman Allah”

Setelah pengakuan / penyerahan kedaulatan dari pihak Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949 dan segera setelah itu terbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) terjadilah pergolakan-pergolakan di daerah. Di Sulawesi Selatan ada pemberontakan DI / TII yang merupakan lanjutan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pimpinan Abdul Kahar Muzakkar. Di Sulawesi Utara / Tengah ada Permesta.

Di Luwu dan Tana Toraja, selain DI/TII, ada juga beberapa peristiwa seperti “Revolusi Tani” yang dipelopori Partai Komunis Indonesia (PKI), peristiwa tahun 1953/1958 yang lebih dikenal sebagai peristiwa Andi Sose, ketegangan antara partai-partai (khususnya dalam rangka pemilihan umum tahun 1955 yang dimenangkan oleh PARKINDO), dan dampak dari peristiwa G. 30. S/PKI.

Menghadapi DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar, Gereja Toraja sebagai lembaga (KUGT) tidak dapat berbuat banyak kecuali menampung para pengungsi di berbagai tempat pengungsian. Pada umumnya para pengungsi itu adalah para penduduk yang tidak mau dipaksa masuk Islam. Para pengungsi itu di tempat pengungsiannya mendapat perlindungan dari pemerintah pusat(TNI), tetapi juga berinisiatif sendiri melindungi diri dengan membentuk pasukan penjaga kampung (OPD atau OPR) atau membuat perlindungan sekeliling kampung. Meski begitu banyak juga orang Kristen yang terbunuh karena mempertahankan imannya.

Dalam hal Revolusi Tani (1951-1953), khususnya di Tana Toraja, kejadiannya diawali, dengan kedatangan tentara Jawa, Batalion 422 Diponegoro di bawah pimpinan Yusuf Maladi pada akhir tahun 1951 atau awal

tahun 1952 yang sebagian besarnya menganut paham PKI.« Merelah yang menyemangati rakyat yang pada masa dahulu dirampasi tanahnya oleh para penguasa (bangsawan) untuk kembali memperoleh tanahnya. Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat (PR), organisasi massa PKI, hasil penggalangan tentara Jawa itu, melakukan gerakan merebut kembali tanah mereka. Banyak bangsa yang terbunuh dalam “revolusi tani” tersebut. Peristiwa tersebut tidak mendapat tanggapan dari gereja.

Dengan kedatangan tentara Jawa ke Toraja terbentuklah pula PKI di sana. Dan ternyata banyak orang Toraja yang menjadi anggotanya, tidak terkecuali orang Kristen anggota Gereja Toraja. Pada masa itu, antara tahun 1951-1965, pengetahuan orang Toraja tentang paham PKI tidak banyak, apalagi PKI adalah partai legal dalam Negara. Barulah setelah peristiwa G.30 S/PKI pada tahun 1965 Gereja Toraja, lewat Surat Penggembalaannya (1967) menyatakan penyesalannya.⁵

Bukan hanya partai komunis (PKI) yang terbentuk di Tana Toraja dan Luwu. Partai-partai lainnya, seperti Partai Nasional Indonesia(PNI), Parkindo, Kedaulatan Rakyat, Masyumi, PSII, dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) juga didirikan. Parkindolah yang memenangkan pemilihan umum pada tahun 1955 di Toraja karena partai-partai lainnya dianggap asing: kalau tidak dianggap partai Jawa, adalah partai Bugis. Partai Kristen Indonesia dengan symbol lilin dan pohon terang adalah Toraja atau Kristen.

Peristiwa tahun 1953/1958 yang lebih dikenal sebagai peristiwa Andi Sose dapat diatasi oleh warga masyarakat Toraja yang melihat peristiwa itu ... sebagai upaya Islamisasi terhadap masyarakat Toraja. Di bawah pimpinan

* T.W. Bigalke, *Op. Cit.* hlin 241-242.
J.A.Sarira»*Op. Cit.* hlm. 314-315.

Parkindo Cabang Toraja, masyarakat Toraja berhasil mengusir Andi Sose dan tentaranya serta simpatisannya dari Tana Toraja. Karena Parkindo hampir identik dengan Gereja Toraja, itu berarti Gereja Toraja juga sudah berhasil menghindarkan Tana Toraja dari upaya Islamisasi.

Pada tahun 1966 sebagian dari warga Gereja Toraja, khususnya yang menyebut diri sebagai orang Luwu, atau non Tana Toraja, memisahkan diri dan mendirikan Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL). Pemisahan diri itu bukanlah disebabkan oleh masalah ajaran gereja (teologi) melainkan oleh dominasi kepemimpinan dalam gereja yang banyak diduduki oleh orang-orang dari Tana Toraja. Dirasakan adanya suatu diskriminasi. Pada awal dimulainya gerakan pemisahan diri itu Gereja Toraja berusaha supaya tidak terjadi tetapi pada akhirnya tidak tercegah. Alasan lainnya untuk pemisahan itu adalah bahwa adanya suatu gereja dengan label Luwu di daerah Luwu sendiri akan lebih memudahkan gereja bersaksi memberitakan Injil Yesus Kristus. Dengan terbentuknya GPIL berarti gereja hasil PI GZB di Luwu dan Tana Toraja menjadi dua Gereja, yaitu Gereja Toraja dan Gereja Protestan Indonesia Luwu.

Walaupun banyak kejadian yang seakan-akan badai menerpanya selama kurun waktu 1947-1967 Gereja Toraja tetap tegak, bahkan dapat dikatakan bahwa badai-badai tersebut telah menjadikannya kokoh bertahan dan berdiri tegak. Dalam masa antara 1950-1970 penambahan jumlah anggota Gereja Toraja demikian drastis, dari hanya sekitar 45.000 di awal berdirinya menjadi 172-39² pada tahun 1970⁶.

Sepanjang kurun waktu 1947-1967 Gereja terus memperkuat dan membangun dirinya agar tetap eksis dan terus bertumbuh. Hampir

⁶ *Ibid.* hlm.11 1.

bersamaan dengan berlangsungnya sinode I Gereja Toraja (1947) diadakan juga sebuah kegiatan pendidikan teologi yaitu Sekolah Pendeta (1947-1949) yang pesertanya hampir seluruhnya direkrut dari sejumlah orang yang telah mengikuti kursus guru Injil pada tahun 1930-an. Sekolah Pendeta tersebut berlangsung hanya satu angkatan, tetapi alumninya telah menampakkan dedikasinya mengawal jemaat-jemaat yang tumbuh pesat dalam masa-masa pergolakan sosial-politik sepanjang tahun 1950-an sampai akhir tahun 1960-an. Dapat dibayangkan betapa beratnya pelayanan mereka. Ada di antaranya yang melayani lebih dari 15 jemaat yang bertebaran di pegunungan dan lembah. Mereka melayani anggota jemaat yang baru masuk Kristen secara massal sebagai akibat dari kegiatan DI/TII yang memaksa mereka untuk masuk Agama Islam.

Pada tahun 1952 Sekolah Alkitab Gereja Toraja dibuka⁷. Sekolah ini dirancang untuk pengadaan guru-guru jemaat, guru-guru Injil dan pendeta. Direncanakan bahwa setiap dua tahun diadakan seleksi. Mereka yang tidak bisa meneruskan pendidikannya diangkat menjadi guru jemaat. Dua tahun kemudian mereka yang meneruskan pendidikannya diseleksi lagi. Mereka yang tidak dapat meneruskan pendidikannya dijadikan guru Injil. Pada akhirnya mereka yang terus ke tahun yang keenam akan menjadi pendeta. Sekolah ini gagal mencapai cita-citanya karena hanya mampu menghasilkan guru-guru jemaat. Masalahnya adalah kekurangan tenaga pengajar.

Pada tahun 1954 oleh KUGT didirikan sebuah Yayasan untuk mengelola pendidikan umum, yaitu Yayasan Perguruan Kristen Toraja (YPKT). Yayasan • tersebut telah menjalankan pelayanannya dengan baik.

⁷ Menurut Dr. Th. Van den End, Sekolah Alkitab itu dibuka pada September 1951 (lihat catatan kaki dalam Sumber-Sumber zending, halaman 671, Dokumen 199).

Alumni dari sekolah sekolah yang dibinanya, antara lain SGA Kr. telah menjalankan tugas pengabdianya pada berbagai sekolah Kristen dan sekolah negeri, pada tingkat SD dan SLTP. YPKT juga membuka sebuah College Pendidikan Guru (CPG) yang alumninya mengabdikan pada sekolah-sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) dan yang sederajat.

Usaha di bidang kesehatan pun, yang telah merupakan alat PI pada masa GZB, digiatkan. Pada tanggal 2 Mei 1962 sebuah Yayasan dibentuk dengan nama Yayasan Kesehatan Gereja Toraja (sekarang Biro Kesehatan Gereja Toraja).

Karena kuantitas anggota Gereja Toraja terus bertambah sedang tenaga pelayan kurang, maka pada tahun 1962 didirikan sebuah lembaga pendidikan Agama Kristen, yaitu PGAAP/P (Pendidikan Guru Agama Atas Kristen/Protestan), dan pada tahun 1964 Sekolah Tinggi Theologia yang diasuh oleh sebuah Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Theologia.

Bidang pelayanan lainnya adalah pada bidang pelayanan, di antaranya Panti Asuhan Kristen Tangmentoe (1964), Asrama Elim, Asrama Putri Makale. Bidang pelayanan yang menangani kaum wanita, pemuda, dan anak-anak pun diadakan. Untuk kaum perempuan dibentuk Persekutuan Wanita Gereja Toraja (5 Desember 1966 sebagai imbalan PWKI), untuk kaum pemuda dibentuk PPGT (Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, 11 Desember 1962, sebagai imbalan GAMKI).

Diselenggarakan pula 3 bentuk pendidikan agama yang meliputi: a. Katekisasi calon baptis/sidi di jemaat-jemaat, b. Sekolah Minggu/Kebaktian Anak yang diselenggarakan oleh Komisi Pendidikan Kader, c. Pendidikan Agama di sekolah-sekolah oleh Komisi Pendidikan Agama.

Sementara itu, untuk pelayanan di sekitar pembangunan Ekonomi diadakan 3 macam proyek, yaitu:

1. Percetakan dan Balai Buku Gereja Toraja
2. Proyek Pertanian Buntu Marampa di Salu Ampak, yakni sebuah perusahaan kooperatif yang bertujuan membiayai pensiunan guru-guru dan YPKT
3. Proyek Rante Tagari, untuk pendidikan teknologi bagi ST 1, ST 2, dan STM yang meliputi bangunan, diesel listrik, dan perlengkapan mesin-mesin untuk praktek.

3, Gereja Toraja dan Politik

Untuk waktu yang cukup lama, dapat dikatakan sejak GZB hadir (1913),^r Gereja Toraja tidak melihat urusan politik sebagai bagian pelayanannya. Politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan jahat atau busuk. Hal tersebut dipahami karena sebagian dari parautusan GZB terpengaruh oleh Pietisme yang berusaha untuk “menjauhi dunia”. Politik adalah urusan dunia jadi harus dihindari⁸. Pastilah juga parautusan GZB itu tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintahnya, kolonial Belanda, yang memang sedang alergi terhadap kebangkitan nasionalisme pada awal abad ke-20 di kalangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ada tuduhan utusan GZB yang menganggap bahwa sebagian orang Toraja, khususnya kaum terpelajar yang memperoleh pendidikannya di luar Toraja, antara lain di Jawa, telah “kena pukau cita-cita kemerdekaan”?

* Bandingkan Notohamidjojo, *Tanggungjawab Geredja dan Orang Kristen dibidang Politik*, BPK. Djakarta, 1969, hlm28.
⁸ Sumber: Sumber Zending, Delapan 190, hlm 641

Pada tahun 1930 sebuah organisasi yang diberi nama Persatoean Toradja Christen¹⁰ didirikan, dan pada akhir tahun 1940-an, tepatnya pada tahun 1948 berubah nama menjadi PARKI (Partai Kristen Indonesia) serta tetap menggunakan Anggaran Dasar PTC. Pada tanggal 18 Agustus 1949 PARKI berganti nama lagi menjadi Partai Kristen Indonesia (PARKINDO). Parkindo inilah yang dapat dikatakan partai yang memegang kendali di sepanjang tahun 1950-an sampai berfusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia sejak tahun 1971. Terkenallah tokoh-tokoh politik dari kalangan Parkindo zaman itu, antara lain F.Kareba, yang cukup lama berperan dalam DPRD Tana Toraja, WL Tambing yang pernah menjadi anggota MPR., dan J.Linting seorang pendeta yang sekali gus juga seorang politisi Parkindo. Pdt. J.Linting inilah yang oleh Pdt Th.Kobong disebut sebagai *Londongna Toraya*, artinya ayam jantan dari Toraja. Dalam dirinya ia memegang dua jabatan yang dipersatukan, jabatan gerejawi yaitu pendeta (ketua KUGT atau sekarang BPS, atau BPMS) dan jabatan politik yaitu ketua Parkindo.

Dalam masa pergerakan politik kala itu, banyak anggota Gereja Toraja secara individu mengambil jalannya sendiri, misalnya terjun ke medan perjuangan bersenjata melawan dan menghadapi gerombolan DI/TII Kahar Muzakkar dan melawan Andi Sose, menghadapi revolusi tani dan PKI. Keterlibatan anggota Gereja Toraja dalam menghadapi berbagai badai yang menimpa masyarakat bukanlah “fatwa” langsung dari Gereja sebagai institusi dan dari pimpinannya, melainkan keputusan pribadi setiap anggota yang merasakan perlunya melibatkan diri dalam memperjuangkan kemerdekaan, keamanan, kedamaian dan ketenteraman.

¹⁰ Lihat Notulen Konkerda Parkindo tahun 1969, hlm.1.

Secara teologis, Gereja Toraja sebagai institusi pengemban misi belum memikirkan dan mengimplementasikan peranannya di dalam dunia, khususnya di bidang sosial politik. Keikutsertaan anggota jemaat secara pribadi di dalam berbagai peristiwa yang mereka hadapi bukanlah karena keputusan di atas pijakan kokoh penghayatan iman kristianinya, melainkan karena terpaksa bertindak dan karena dianggap sebagai tuntutan situasi (harus karena kepepet). Jadi lebih banyak pertimbangan non-teologis.

Sekali pun berbagai pergulatan politik itu sudah dilalui dengan baik tetapi sampai saat berakhirnya era ORDE BARU, tahun 1998, partisipasi dalam kegiatan politik oleh Gereja Toraja belum juga dilandasi dengan suatu pemahaman teologis yang mendasar. Pemikiran teologis yang lebih mendasar baru diletakkan sejak diadakannya suatu pertemuan atas prakarsa BPS Gereja Toraja yang dinamakan ‘Pertemuan Khusus Pimpinan Gereja Toraja’ untuk mendiskusikan dan merumuskan pemahaman Gereja Toraja mengenai ‘GEREJA dan POLITIK’. Hasil dari pertemuan itu akan menjadi "pedoman Gereja Toraja sebagai institusi pada seluruh aras dan dalam semua unit pelayanannya, dan oleh segenap warga Gereja Toraja sesuai bidang tugas masing-masing, khususnya di bidang politik, dalam menjalankan tugas kesaksiannya sebagai umat Allah di tengah-tengah dan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia¹¹ Jelas dari pertemuan itu bahwa Gereja Toraja telah menyadari tugasnya di bidang politik sebagai lapangan pelayanannya juga. Bidang pelayanannya bukan hanya di bidang rohani tetapi juga di bidang duniawi (jasmani). Kerajaan Allah tidak hanya memperhatikan kerajaan yang akan datang tetapi sekarangpun. Untuk itulah gereja selalu berdoa “Datanglah Kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Gereja Toraja juga telah ¹¹

¹¹ Membangun Jemaat, Edisi Khusus, thn 1999.(terbitan BPS). Band. O. Notohamidjojo, *Op.Cit.* hlm. 65

mengaku bahwa pemerintah dan lembaga-lembaganya adalah alat di tangan Tuhan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebenaran serta memerangi kejahatan dalam tanggungjawab kepada Tuhan dan kepada rakyat tetapi harus senantiasa berada di bawah kritik Firman Allah, dan harus didoakan, dibantu agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan kehendak Allah untuk kesejahteraan manusia.¹²

4. Gereja Toraja dan Lembaga Pendidikan Teologi

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, Gereja Toraja, karena kebutuhan pelayanannya yang mendesak sebagai akibat dari penambahan secara kuantitas pada tahun 1950-an sampai dengan pertengahan 1960-an, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan teologi. Satu di antaranya ialah STT Rantepao yang didirikan pada tahun 1964. Berhubung dengan anggapan bahwa pelayan yang dibutuhkan sudah mencukupi, dan dalam rangka mendukung kerja sama oikumenis, yaitu mendukung Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur (STT INTIM), maka dalam Sidang Sinode Am XVI Gereja Toraja tahun 1981 di Makale, STT Rantepao, waktu itu baru sampai tingkat sarjana muda dengan gelar Baccalaureat Theologi (B.Th.), ditutup dan diganti dengan suatu lembaga yang dinamakan Institut Teologi yang mengkhususkan diri pada bidang penelitian budaya. Tidak lama kemudian, dalam Sinode Am Gereja Toraja XVII, tahun 1984 di Palopo, STT Rantepao dibuka kembali yang tingkatannya sampai dengan sarjana teologi (S.i). Sepuluh tahun kemudian, atas keputusan Sinode Am XXI GT di Palopo menerima tawaran pemerintah (untuk menegerikan STT Rantepao. STT . Rantepao kemudian ditutup lagi. Penerimaan itu didasarkan pada pemahaman bahwa melalui pendidikan

¹² Pusbang-BPS Gereja Toraja, *Pengakuan Gereja Toraja*, Rantepao, 1994 -Bab VII.6

teologi yang dikelola pemerintah warga Gereja Toraja akan lebih mengambil peran yang lebih baik lagi di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, tidak hanya di lingkungan gereja. STT Rantepao kemudian beralih menjadi Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri-Toraja Hal itu dikuatkan dengan suatu surat Keputusan Menteri, 12 April 2004. Lima tahun telah berlalu sejak tahun 2004 dukungan Gereja Toraja terhadap kehadiran STAKN-Toraja itu. Hal itu dinyatakan dalam suatu pertemuan para utusan dari klasis-klasis Gereja Toraja di Tangmentoe bahwa jemaat-jemaat dan klasis-klasis akan tetap memberi dukungan. Pernyataan itu merupakan keputusan Gereja Toraja , sebab pertemuan itu dilaksanakan oleh BPMS Gereja Toraja. Masalah-masalah teologi dalam Gereja Toraja sekarang berada di bawah unit Institut Teologi Gereja Toraja.

,

5. Gereja Toraja dan masalah kebudayaan

Hubungan dengan masyarakat, khususnya mereka yang masih menganut agama suku, dari sejak awal mengalami ketegangan. Hal itu terkait dengan pemahaman bahwa mereka yang masuk Kristen secara otomatis meninggalkan adat istiadat dan kebudayaannya dan menjadi penganut agama Belanda (*Aluk Balanda* = adat istiadat Belanda). Mereka pun dilarang ikut dalam kegiatan-kegiatan keluarga yang masih beragama suku. Dengan kata lain yang masuk Kristen dikucilkan dari masyarakat. Bahkan banyak dari orang-orang Kristen berstatus sosial tinggi masih menuntut hak-hak istimewanya sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat penganut Agama suku.

Dalam kurun waktu 1947-1970 Gereja Toraja telah 12 kali mengadakan Sidang Sinodenya. Singkatnya jarak persidangan itu (rata-rata beijarak 2

tahun) memperlihatkan banyaknya masalah yang dihadapi oleh Gereja Toraja. Di samping masalah-masalah dari luar, masalah-masalah dalam Gereja pun sangat banyak. Masalah-masalah pembinaan warga gereja sangat diutamakan sebab pada masa itulah Gereja Toraja mengalami penambahan jumlah anggota karena terjadinya baptisan massal akibat masuknya ribuan penganut agama suku ke dalam Gereja Toraja, dan oleh tantangan-tantangan dari gereja-gereja sekte.

- Di antara masalah-masalah yang banyak itu masalah adat-istiadat dan budayalah yang paling menonjol. Hasil pergumulan itu telah menghasilkan suatu pengakuan iman. 's Pengakuan Iman Gereja Toraja itu telah dijadikan sebagai bahan pembinaan warga gereja, dan diperkaya juga oleh hasil penelitian Pusbang Gereja Toraja, yaitu *“Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam perjumpaannya dengan Injil, “Manusia Toraja”, “Aluk Rambu Solo’-persepsi orang Kristen terhadap ‘Rambu Solo’”-*, *“Roh-Roh dan Kuasa-Kuasa Gaib”*.

Khusus dengan jemaat-jemaat yang berada di Toraja, masalah-masalah adat-istiadat pada tahun-tahun terakhir ini marak lagi dipersoalkan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari apa yang dinamakan Aliansi Masyarakat Adat yang ingin memberlakukan kembali secara lebih tegas/keras aturan-aturan atau Hukum Adat menurut warisan leluhur. Sudah tentu hal itu bertabrakan langsung dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam gereja. Gereja perlu lagi lebih menjelaskan hubungan gereja dengan adat dan kebudayaan, yakni masalah teologi kontekstual.

Dalam hubungannya dengan masalah adat dan kebudayaan Gereja Toraja telah berusaha sedemikian rupa untuk dapat berteologi secara kontekstual. Salah satunya dapat dilihat dalam pengadaan nyanyian-nyanyian gerejawi dengan nuansa /lagu etnik Toraja. Dalam hal ini patutlah dicatat seorang yang sangat bejuang untuk pengadaan nyanyian gerejawi dengan nuansa etnik itu ialah Pdt Tiku Rari, M.Th. Ia tidak hanya berusaha untuk pengadaan nyanyian gerejawi bernuansa etnik Toraja tetapi juga, bersama dengan unit Pusbang (sekarang Institut Teologi Gereja Toraja, memanfaatkan berbagai seni Toraja (Tari dan seni suara, atau gabungan dari keduanya, misalnya *manimbong*, *ma'badong*, dll sebagainya/ dalam kegiatan gereja, antara lain dalam liturgi kebaktian Hari Minggu atau dalam liturgi kebaktian khusus.